

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

**HUSNUL IMTIHAN
WAHYUNADI
FIRMANSYAH**

**rijalulbayan@yahoo.com
Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram**

ABSTRAK

Secara khusus, penelitian ini akan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan Pembangunan belum terlibat sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, dan dokumen. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, (2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Negara didirikan dengan satu tujuan utama, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini antara lain adalah kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman bagi rakyatnya serta meningkatkan harkat dan marabat rakyat sebagai manusia. Pembangunan merupakan, sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. ¹

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan

¹ Puspita, I 2016 Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara) Jurnal Ilmu Ekonomi (JE) Vol .1 (1): 2-3

masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan, yang diawali dari proses perencanaan. Selain itu, masyarakat akan lebih percaya pada program pembangunan tersebut jika mereka dilibatkan, dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Gunungsari memiliki dua posisi utama, yakni sebagai pelaku utama (*actors, participant*) dan pemanfaat (*beneficiaries*), Proses perencanaan partisipatif, merupakan proses perencanaan yang mempertemukan mekanisme perencanaan dari pusat (*top down*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).²

Kegiatan pembangunan di Kecamatan Gunungsari, fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, diantaranya program peningkatan Infrastruktur dan program peningkatan Ekonomi, Pembangunan wilayah Desa Taman Sari tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan kinerja aparat pemerintah.³

Pelaksanaan Musrenbang yang bersentuhan langsung pada masyarakat yaitu pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa. Dengan adanya musrenbang desa ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Fenomena Kegiatan Musrenbang Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini belum optimal, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan hanya pada pengusulan program/kegiatan dan belum turut serta dalam setiap proses perencanaan seperti: menyelidiki dan mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan kebutuhan.

² Azhar, F (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya* 3 (2): 63-64

³ Dokumen RPJMD Kab Lobar 2016, h.2

Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 bab II tentang asas dan tujuan Pembangunan Nasional, menyatakan tujuan dari perencanaan pembangunan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan⁴. Melalui kegiatan Musrenbang partisipasi masyarakat akan lebih optimal, keikutsertaan masyarakat dalam forum tersebut dapat memberikan informasi berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, dari pernyataan tersebut bahwa esensi dari sebuah kegiatan pembangunan adalah adanya kegiatan pembangunan yang berdimensi luas meliputi seluruh unsur yang berkepentingan baik masyarakat maupun pemerintah.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar sebagai pelengkap kegiatan seremonial semata.⁵ Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu

⁴ Undang-Undang No.25 th 2004 (SPPN), h.5.

⁵ Nasution.M.A 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010)*. Tesis

kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan proses, tahapan, dan keterlibatan berbagai unsur dalam merumuskan program kerja Pemerintah yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Secara khusus penelitian ini akan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif saat ini didukung dengan adanya otonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat nasional. Selanjutnya Slamet (2003) ⁶menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Rowe dan Freyer (2004) ⁷menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan. Lebih lanjut lagi menurut Sihombing menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri Khairuddin, (2000) ⁸

⁶ Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta:Sebelas Maret University Press. h. 35.

⁷ Rowe, Gene and Lynn J. Frewer. 2004. Evaluating Public-Participation Exercises: A Research Agenda. *Science, Technology, & Human Values*, Vol.29, No.4, pp. 512-557

⁸ Khairuddin. 2000. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Bumi Aksara. h 78.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994)⁹ yang lebih lanjut mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

- a. Masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
- c. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Suzetta (2007),¹⁰ sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

2. Musrenbang sebagai implementasi Perencanaan Partisipatif

Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat nasional. Musrenbang pada tingkat Kabupaten merupakan forum bagi pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi *stakeholder* untuk membahas prioritas pembangunan di daerah yang selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Musrenbang Desa adalah forum musyawarah

⁹ Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 35.

¹⁰[http:// www. Suzeta. Perencanaan Pembangunan Nasional](http://www.suzeta.org), di unduh 5 januari 2016

tahunan yang dilakukan di tingkat paling bawah untuk mendapatkan usulan-usulan yang berasal dari masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan yang akan dikerjakan, hasil perencanaan ini berfungsi sebagai penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama proses kebijakan pembangunan dilakukan secara *top-down*, penentuan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat yang berwenang) tanpa mengikutsertakan masyarakat dan *stakeholder* yang lainnya, maka akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan Laksana, (2012)¹¹

3. Konsep Pemerintahan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Saat ini telah terjadi pergeseran dari paradigma *government* menjadi *governance*. *Governance* mulai dikenal di Indonesia kurang lebih pada tahun 1990. Sejak adanya krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengarah kepada *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. *Governance* difokuskan pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Governance* meliputi tiga sektor penting yaitu sektor negara, sektor swasta dan masyarakat Sedarmayanti, (2007)

Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme) ¹²adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Lebih lanjut prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu

¹¹ Laksana, Nuring Septyasa. 2012. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Pembanguna*

¹² Bob, Sugeng, Hadiwinata. 2009. *Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, visi strategik serta efektivitas dan efisiensi. Dari kedelapan prinsip tersebut, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Wagle, demokrasi memiliki makna ketika masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah memiliki implikasi besar bagi masyarakat Dwiyanto,(2006). Partisipasi masyarakat dalam konteks *Good Governance* menuntut perlu adanya hubungan atau keterkaitan langsung antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk keterwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Purnamasai ¹³(2008), Kecamatan Cibadak, menjelaskan tingkat partisipasi dalam kegiatan musrenbang masih rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hasil maupun kualitas perencanaan semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin berkualitas perencanaan tersebut, fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat dan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, penelitian ini menunjukkan salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan partisipatif terletak pada fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, adanya kesamaan dengan penelitian di Kecamatan Gunungsari terletak pada fokus perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat.

¹³ Purnamasari, *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, Tesis, 2008

Penelitian, Vivaldi (2015)¹⁴ judul Peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Di Desa Sebau' Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang menjelaskan bagaimana peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, berdasarkan hasil penelitian, Vivaldi menjelaskan bahwa peran pihak penguasa yaitu Kepala Desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama menciptakan pembangunan yang berdasar pada masalah dan kebutuhan masyarakat, artinya peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini tidak lepas dari konsekuensi demokrasi yang mewakilkan suara rakyat kepada beberapa orang di lembaga eksekutif maupun legislatif.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, dan dokumen. Lokasi penelitian di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014),¹⁵ yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

¹⁴ Vivaldi, *Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa di Kecamatan Seba'u Kabupaten Bengkayang*, Volume 4 (4): 2-4

¹⁵ Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta h. 89

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Musrenbang di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

a. Musrenbang Desa

Penyusunan perencanaan pembangunan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di suatu daerah, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Musrenbang Desa Taman Sari,¹⁶ di Wilayah Kecamatan Gunungsari merupakan musyawarah dalam menyusun perencanaan dan menetapkan program pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan tersebut belum disertai dengan pengkajian keadaan desa atau wilayah perencanaan, proses identifikasi keadaan desa tujuannya sebagai pedoman menyusun dan menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Proses identifikasi dan pengkajian keadaan Desa tersebut masih di dominasi aparat pemerintah Desa tanpa berkoordinasi dan melibatkan masyarakat Dusun. Proses identifikasi dan kajian keadaan Desa seharusnya melibatkan masyarakat dari RT/RW setempat.

Peran pemerintah seperti yang tertera dalam *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan penyelarasan aktivitas-

¹⁶ Musrenbang Desa Taman Sari, Data diolah

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

b. Musrenbang Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk memfasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.¹⁷

Kegiatan Musrenbang kecamatan dan Musrenbang tahap selanjutnya, merupakan musyawarah perwakilan masyarakat atau forum musyawarah tahunan stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan, Peserta Musrenbang Kecamatan merupakan perwakilan masyarakat Desa. Kegiatan Musrenbang Kecamatan di wilayah kecamatan Gunungsari¹⁸ merupakan kegiatan reviuw kembali dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sesuai dengan program kerja pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam hal ini aspirasi masyarakat di sampaikan melalui delegasi atau utusan, para delegator (utusan) telah dipilih melalui Musrenbang Desa, tugas dari para utusan adalah menyampaikan dan mengawal program pembangunan Desa untuk dijadikan program pembangunan yang akan di usulkan kembali pada tahap Musrenbang Kabupaten

Rowe dan Freyer (2004)¹⁹ menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam

¹⁷ Djorebe, R *Penerpan Fungsi Pembinaan Camat Terhadap Aparatur Desa di Kecamatan Galela*, Artikel 20015 h.3

¹⁸ *Musrenbang Kecamatan Gunungsari*, data diolah

¹⁹ idem

penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Riyadi dan Bratakusumah (2004)²⁰ mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeraskan dan penyesuaian aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gunungsari pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gunungsari

1) Kesesuaian Rencana dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.

Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dimaksud adalah masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak dan dirasakan oleh

²⁰Riyadi dan Bratakusumah, DS. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

sebagian besar warga masyarakat, dengan banyaknya masalah dan kebutuhan yang di usulkan masyarakat dalam Musrenbang Desa banyak yang tidak sesuai dengan program Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah atau Program Kerja SKPD, sehingga tidak menjadi usulan program pembangunan untuk dibawa pada Musrenbang tahap selanjutnya di tingkat Kecamatan, maupun Kabupaten, hal ini berdampak pada tingkat kehadiran maupun partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan Daerah.

2) Anggaran

Tingkat ketersediaan dana menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu akan terus terjadi hingga masa-masa datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan dan Renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang dan forum SKPD. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya partisipasi mereka dapat diserap, persoalan keterbatasan anggaran yang tersedia menjadi penyebab utama tidak dapat terakomodasinya seluruh usulan masyarakat dalam APBD Kabupaten Lombok Barat²¹

²¹ Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin, *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif 2003-2009)*Tesis 2015. h. 90

3) Kepentingan Politik

Pelaksanaan Pembangunan seringkali menjadi ajang pertarungan politik, mulai elit politik di tingkat desa maupun kabupaten (eksekutif dan legislatif), akibatnya banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan “titipan” dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, walaupun secara penganggaran relative kecil. Fakta yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat bahwa kegiatan-kegiatan titipan tersebut, terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik yang juga relevan dengan usulan Musrenbang, sehingga pengaruhnya tidak terlalu nyata.

b. Peran Aparat Pemerintah dalam Musrenbang di Kecamatan Gunungsari

Dalam program prioritas daerah, kecamatan Gunungsari selektif dalam memilih usulan-usulan mana saja yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan usulan mana saja bisa ditunda. Banyaknya usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di kecamatan Gunungsari, maka pemerintah memprioritaskan program sesuai dengan visi misi kegiatan yang sesuai dengan program prioritas daerah, dan diharapkan pula masyarakat dapat memahami pengambilan keputusan tersebut. Adanya usulan yang belum diakomodir oleh pemerintah dan terhalang keterbatasan anggaran dana yang ada, maka pemerintah kecamatan Gunungsari menindaklanjuti usulan masyarakat pada tahun anggaran yang akan datang.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang berfungsi untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan rangkaian kegiatan pembuatan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah yang berkuasa yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat daerah

tersebut. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan semua tersusun berdasarkan Visi dan Misi pemerintah penguasa peran masyarakat hanya sebagai yang memberikan masukan tentang apa yang mereka butuhkan, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan masih bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan.²²

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di wilayah kecamatan Gunungsari belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, karena ada tahapan yang belum dilaksanakan, terutama pelaksanaan Musrenbang Desa
- b. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di wilayah Kecamatan Gunungsari, antara lain kesesuaian rencana dengan masalah dan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan kepentingan politik
- c. Peran Pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Gunungsari terkesan masih mendominasi pada setiap tahapan Musrenbang sehingga perencanaan tersebut masih bersifat elitis dalam artian pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

²² Wirawan R, Mardiyono, dan Nurpratiwi *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah JISIP*, ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)

2. Saran

- a. Melihat proses musrenbang di kecamatan Gunungsari belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka kedepannya disarankan meningkatkan keaktifan serta keterlibatannya dalam semua tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan suatu hal yang wajib hukumnya, dengan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah semua masalah pembangunan akan dapat di selesaikan, karena dengan adanya peran masyarakat tersebut masyarakat akan lebih percaya terhadap semua kebijakan yang di keluarkan pemerintah, baik anggaran maupun politik
- c. Aparat kecamatan perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Gunungsari, perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarakan kebutuhan masyarakat yang kadang terbentur dengan situasi pemerintahan dan politik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bob, Sugeng, Hadiwinata. 2009. *Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Dwiyanto, Agus. 2006 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Khoiruddin. 2000. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, DS. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama

- Azhar, F (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya* 3 (2): 63-64
- Laksana, Nuring, S. 2012. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Airlangga. Surabaya
- Ashari M, Wahyunadi dan Hailuddin, Analisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara, (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif 2009-2013)*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 6 (2) 171-173
- Nasution.M.A 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010)*. Tesis
- Sari, Irma, P 2008 *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* Tesis Universitas Diponegoro
- Sari, Puspita, I 2016 *Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara)* Jurnal Ilmu Ekonomi (JE) Vol .1 (1): 2-3
- Satries, W, Ishardianto 2011, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang* Jurnal Keybernian 2 (2): 90, 94, 99
- Suroso H, Hakim A, dan Noor I, (2014), *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*, Universitas Brawijaya, 17(2):
- Vivaldi, Rilo, K (2015). *Peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Seba'u Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang*, Volume 4 (4): 2-4
- Wirawan R, Mardiyono, dan Nurpratiwi *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* JISIP ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.